

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setelah presiden Sukarno turun dari jabatannya, jenderal Suharto mengambil alih kepemimpinan nasional dan masa ini dikenal sebagai Orde Baru. Pada masa ini fokus utama pemerintahan adalah menjaga stabilitas politik untuk mendukung upaya pembangunan nasional.¹

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto berhasil mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun di Republik Indonesia kurun waktu antara tahun 1966-1998.² Untuk menjaga stabilitas politik dan pembangunan Orde Baru menggunakan cara pemerintahan yang tidak biasa. Demi menjaga stabilitas politik yang mendukung pembangunan nasional, dilakukan berbagai reformasi dalam sistem ketatanegaraan dan format politik dengan menonjolkan pada hal-hal berupa, konsep Dwifungsi ABRI digunakan sebagai *platform* politik Orde Baru.

Militer dan kekerasan politik pada masa Orde Baru merupakan dua hal yang selalu melekat satu sama lain. Kekerasan politik yang dilakukan oleh militer pada awalnya dimaksudkan untuk mendukung restrukturisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Namun Seiring berjalannya waktu, kekerasan tersebut mulai digunakan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan Suharto dan kelompok Partai Golkar. Selama era Orde Baru, tindakan intimidasi dan kekerasan politik oleh militer menjadi hal umum guna memastikan kemenangan Golkar dalam setiap pemilihan umum dan menjaga posisi Suharto sebagai kepala pemerintahan.³

¹ Satrio Saptohadi, 'PASANG SURUT KEBEBASAN PERS DI INDONESIA', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 no 1 (2011), 12.

² Dwi Wahyono Hadi and Gayung Kasuma, 'PROPAGANDA ORDE BARU 1966-1980', *Verleden*, Vol. 1, (2012).

³ Ikrar Nusa Bhakti, *Militer Dan Politik Kekerasan Orde Baru* (Bandung, 2001).

Berbagai aksi dilakukan oleh militer dan pemerintah Orde Baru, salah satunya yaitu ialah peristiwa 27 Juli 1996 peristiwa ini merupakan peristiwa perebutan Kantor DPP PDI yang berada di jalan Pangeran Diponegoro no 58, Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini terjadi di karenakan adanya permasalahan antara kubu Soerjadi dan kubu Megawati.

Peristiwa ini berakar dari serangkaian konflik dalam tubuh partai Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Konflik ini dimulai ketika nama Megawati Sukarno putri muncul sebagai Kandidat ketua umum dalam Konferensi Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya pada tahun 1993. Kehadiran Megawati ini tidak sesuai dengan rencana pemerintahan Suharto dan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan Orde Baru, karena pada saat yang sama pemerintah Orde Baru mendukung Siti Hardiyanti Rukmana melalui partai Golkar.⁴

Sebagai salah satu peristiwa besar, tentu saja peristiwa ini di muat dalam pemberitaan, baik itu dalam pemberitaan media Elektronik maupun media Cetak. Di dalam buku Akhmad Efendi yang berjudul *Perkembangan Pers di Indonesia* menyebutkan istilah pers diambil dari kata bahasa Inggris yaitu press yang berarti cetakan. Dalam istilah yang lebih operasional, kata Pers memiliki dua arti, pertama adalah usaha percetakan. Kedua berarti upaya menyampaikan berita melalui media cetak dan elektronik.⁵

Dari dua pengertian yang telah disebutkan, makna yang tepat untuk mendeskripsikan pers adalah yang kedua. Usaha penyampaian berita dengan beragam bentuk adalah kegiatan pers mulai dari surat kabar, radio, televisi, hingga internet. Dalam pengertian lain, secara harfiah pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara di cetak.

⁴ Firman Adi Laksono, 'PERISTIWA 27 JULI 1996 DAN PENGARUHNYA TERHADAP POSISI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM PANGGUNG POLITIK NASIONAL 1996-1999' (UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2017).

⁵ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). hlm. 1

Definisi pers adalah sebuah entitas sosial dan sarana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang melibatkan pencarian, perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, serta gabungan dari elemen-elemen tersebut. Seluruh proses ini menggunakan media cetak, media elektronik, dan berbagai jenis saluran komunikasi yang ada.⁶

Dalam konteks perkembangan media dan jurnalisme, istilah “pers” memiliki dua pengertian utama, yaitu “pers dalam pengertian luas” dan “pers dalam pengertian sempit”. Pers dalam artian luas mencakup segala bentuk media yang menyiarkan atau menerbitkan karya jurnalistik. Ini tidak hanya terbatas pada media cetak seperti surat kabar dan majalah, tetapi juga mencakup media elektronik seperti radio siaran dan televisi siaran. Dalam konteks ini, “pers” merujuk pada semua bentuk media yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, berita, dan analisis kepadamasyarakat luas. Pers dalam pengertian sempit merujuk pada media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan buletin kantor berita.⁷

Dalam perkembangannya Pers di Indonesia terbagi menjadi 4 masa yaitu Masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Dalam masa Kolonial Pers masih banyak di pegang dan diprakarsai oleh pemerintah kolonial Belanda yang hanya bertujuan membela kepentingan kolonial. Isi dari Surat Kabar Belanda sendiri hanya berisi berita tentang Ratu namun pada tahun 1903 surat kabar pribumi pertama yang di prakarsai oleh Tirta Adi Suryo yaitu *Medan Prijaji* telah membuka pandangan baru terhadap arus informasi yang di terima oleh Kaum Pribumi.

Surat kabar ini awalnya hanya diterbitkan setiap satu minggu sekali, tetapi seiring perkembangannya pada tahun 1910 *Medan Prijaji* terbit setiap hari. Surat Kabar *Medan Prijaji* disambut baik oleh Bangsa, khususnya oleh

⁶ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). hlm. 2

⁷ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). hlm. 2

para kaum Pergerakan, tidak lama dari itu HOS Cokroaminoto dari “Sarikat Islam” menerbitkan surat kabar *Oetoesan Hindia*. Semaoen dari tokoh Sosialis Komunis juga menerbitkan Surat Kabar yang diberi Nama *Api*, *Halilintar* dan *Nyala*. Dan tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara juga menerbitkan Surat Kabar *Guntur Bergerak* dan *Hindia Bergerak*. Sementara menurut Pembacaan Basilius Triharyanto, pers pada masa kolonial terpengaruhi oleh asas yang mendasari pers pribumi, yaitu menjadikan pers sebagai alat perjuangan.⁸

Memasuki masa kemerdekaan pers di ambil alih dari pemerintahan jepang dimana posisi jepang pada saat itu kalah dalam perang dunia II dan bangsa Indonesia berupaya untuk menerbitkan surat kabar nya sendiri. Dalam usaha meraih kemerdekaan Indonesia memiliki surat kabar tersendiri yang diberi nama Berita Indonesia yang terbit di Jakarta pada tanggal 16 September 1945.

Pada rentan tahun 1945-1958 sendiri Indonesia masih memiliki kondisi perpolitikan yang masih kurang stabil. Keadaan ini lah yang membuat pers di Indonesia memiliki perlawanan balik dari Negara penjajah Belanda, yang mana Belanda Sendiri membuat surat kabarnya untuk melawan propaganda anti Belanda. di antaranya *Fadjar* (Jakarta), *Soeloeh Rakyat* (Semarang), *Pelita Rakyat* (Surabaya), dan juga *Padjajaran* dan *Persatoean* (Bandung).⁹

Di masa kepemimpinan Sukarno pers sendiri memiliki keberpihakan nya terhadap pemerintah, kemerdekaan pers hanya digunakan sebagai penggring opini yang memperkuat status *quo* dan tidak digunakan sebagai alat untuk membangun keseimbangan sebagai kontrol publik terhadap pemerintah. Surat kabar *Indonesia Raya*, *Pedoman*, dan *Nusantara* menjadi saksi atas pengingkaran janji pemerintah di masa kepemimpinan Sukarno.¹⁰

⁸ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 11

⁹ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 14

¹⁰ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 17

Masa Demokrasi terpimpin, Sukarno lebih memperlakukan Pers sebagai *extension of power* nya. Pada masa itu dapat di katakan sebagai berkuasanya Pers Komunis dan Pers simpatisan-simpatisannya. Pers yang berada pada masa Sukarno yang lainnya, yang kontra terhadap pemeritahan rezim Sukarno, menolak Manipol, dan pers Liberal, diasingkan atau menuai pembredelan. Dominasi pers komunis dan simpatisannya dalam peta ideologi pers Indonesia tahun 1957-1965 merupakan konsekuensi-konsekuensi logis dari semangat kuat dan meningkatkannya pengaruh politik Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dari semangat kuat dan meningkatnya pengaruh politik PKI dan Sukarno. Namun posisi pers berubah menjadi Radikal sejak peristiwa berdarah G30S/PKI. Karena, dalam masa selanjutnya, terhitung tanggal 1 Oktober 1965, seluruh pers yang dianggap sebagai simpatisan PKI dilarang terbit untuk selamanya oleh penguasa rezim baru saat itu di bawah Suharto¹¹

Di masa kepemimpinan Suharto pers memiliki perlakuan berbeda yang mana kebebasan pers sangat terbatas, dan banyak pemebredelan media massa. Pada saat itu terjadi peristiwa yang fenomenal yaitu peristiwa Malari. Peristiwa Malari melibatkan pemeberedelan 12 media cetak. Kasus Malari yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 itu mencatat begitu banyak korban jiwa dan kerusakan terjadi di mana-mana.¹²

Sebenarnya, masa awal kekuasaan Orde Baru, Indonesia dijanjikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Masyarakat saat itu bersuka-cita menyambut pemerintahan Suharto yang diharapkan akan mengubah keterpurukan pemerintahan Orde Lama. Pemerintah pada saat itu harus melakukan pemulihan di segala aspek, antara lain aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan psikologis rakyat. Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit, bahkan perkembangan ekonomi pun semakin pesat. Namun sangat tragis, bagi dunia pers di Indonesia. Dunia pers yang seharusnya bersuka cita menyambut kebebasan pada masa Orde Baru, malah sebaliknya.

¹¹ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 18

¹² Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 20

Pers mendapat berbagai tekanan dari pemerintah. Tidak ada kebebasan dalam menerbitkan berita-berita miring seputar pemerintah. Bila ada maka media massa tersebut akan mendapatkan peringatan keras dari pemerintah yang tentunya akan mengancam penerbitannya.

Lahirnya Orde Baru pada tahun 1966 dilandasi oleh motivasi, tekad dan program untuk menghentikan segala penyimpangan yang terjadi di masa-masa sebelumnya dan melaksanakan pembangunan untuk mengisi proklamasi kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di bidang pers, langkah utama pertama yang diambil adalah menetapkan undang-undang No. 11 Tahun 1966 guna menjamin kedudukan hukum persuratkabaran dan kewartawanan agar pers nasional dapat memenuhi fungsi yang sebaik-baiknya menuju terwujudnya pers Pancasila.¹³

Sebelum UU Pokok Pers akhirnya disahkan pada tanggal 12 Desember 1966, pers Indonesia masih menghadapi peraturan-peraturan yang dirasa menekan oleh para wartawan. Perkembangan politik besar peranannya dalam melahirkan peraturan-peraturan itu. Di antara peraturan-peraturan tersebut, dapat dikemukakan antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer pada 14 September 1956 (peraturan KSAD selaku Penguasa Militer no. PKM/001/0/1956).¹⁴

Pasal 1 peraturan itu menegaskan larangan untuk mencetak, menerbitkan dan menyebarkan serta memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise atau lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung kecaman, persangkaan atau penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, suatu kekusaan atau mejelis umum.¹⁵

Pada masa Orde Baru, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui departemen penerangan. Bila ingin

¹³ Tribuana Said, *SEJARAH PERS NASIONAL DAN PEMBANGUNAN PERS PANCASILA*, 1st edn (Jakarta: Cv Haji Masagung, 1988). Hlm 6

¹⁴ Kompas, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia* (Jakarta, 2002). Hlm 178

¹⁵ Kompas. Hlm 178

tetap berdiri, maka media massa tersebut harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru pers Indonesia disebut sebagai pers Pancasila. Cirinya adalah bebas dan bertanggung jawab.

Tanggal 21 Juni 1994, beberapa media massa seperti *Tempo*, *DeTik*, dan *Editor* dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat Negara, Pembredelan itu diumumkan langsung oleh Harmoko selaku menteri penerangan pada saat itu. Meskipun pada saat itu pers benar-benar diawasi secara ketat oleh pemerintah, namun ternyata banyak media massa yang menentang politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan perlawanan itu ternyata belum berakhir. *Tempo* misalnya, berusaha bangkit setelah pembredelan bersama para pendukungnya yang anti rezim Suharto, Pembredelan 1994 ibarat hujan, jika bukan badai dalam ekologi politik Indonesia secara menyeluruh. Tidak baru, tidak aneh dan tidak istimewa jika dipahami dalam ekosistemnya.¹⁶

Sebelum dibredel pada 21 Juni 1994, *Tempo* menjadi majalah berita mingguan yang paling penting di Indonesia. Pemimpin Editornya adalah Goenawan Mohammad yang merupakan seorang panyair dan intelektual yang cukup terkemuka di Indonesia. Pada 1982 majalah *Tempo* pernah ditutup untuk sementara waktu, karena berani melaporkan situasi pemilu saat itu yang ricuh. Namun dua minggu kemudian, *Tempo* diizinkan kembali untuk terbit. Pemerintah Orde Baru memang selalu was-was terhadap *Tempo*, sehingga majalah ini selalu dalam pengawasan pemerintah. Majalah ini memang populer dengan independensinya yang tinggi dan juga keberaniannya dalam mengungkap fakta di lapangan.¹⁷

Meskipun berani melawan pemerintah, namun tidak berarti *Tempo* bebas dari tekanan. Apalagi dalam hal menerbitkan sebuah berita yang menyangkut politik serta keburukan pemerintah, *Tempo* telah berkali-kali

¹⁶ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 22

¹⁷ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 22

maendapatkan peringatan. Hingga akhirnya Tempo harus rela dibungkam dengan aksi pembredelan itu. Orde Baru juga memainkan politik hegemoninya terhadap pers melalui model model pembinaan. Setidaknya, ada dua arah pembinaan yang terjadi. Pertama, mengimbau atau tepatnya melarang pers memberitakan peristiwa atau isu tertentu dengan segala alasan dan pembenaran, dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pers. Pada kenyataannya pers pada masa itu sedemikian dekatnya dengan logika *self-censorship*, baik hal ini dipaksakan oleh negara ataupun keinginan murni dari pemimpinnya.

Bentuk lain dari hegemoni negara atas pers di tanah air adalah munculnya SIUPP yakni Surat Izin untuk Penerbitan Pers. Orde Baru sedemikian ketatnya dalam hal pengawasan atas pers, karena mereka tidak menghendaki mana kala pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan di media media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang objektif tidak dapat dirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik ataupun sosial.¹⁸

Orde Baru sendiri merupakan rezim pemerintahan yang bersistem militer sehingga pada kepemimpinannya Suharto sangat militerisme, di awal pemerintahannya ketika situasi dalam negeri sedikit mengalami kekacauan akibat intrik-intrik politik dari berbagai kelompok kepentingan, misalkan Partai Komunis Indonesia (PKI), bisa jadi kepemimpinan model militer adalah yang tepat. Situasi yang darurat, anomali sosial begitu banyak, maka situasi semacam itu perlu di stabilkan agar tidak berdampak lebih buruk. Sayangnya model kepemimpinan ini sangat lah tidak cocok pada masa masyarakat yang sedikit-sedikit sudah berubah. Masyarakat semakin cerdas dan semakin paham tentang hakikat demokratis. Dengan sendirinya model kepemimpinan Suharto tertolak oleh masyarakat.

¹⁸ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 24

Pada titik itulah, pers melihat bahwa model kepemimpinan yang digunakan Suharto akan memberangus kebebasan masyarakat. Artinya juga logika kekuasaan semacam itu pada suatu waktu akan menghancurkan dirinya (pers), karena pers adalah salah satu pilar penyusun sistem demokrasi yang memiliki fungsi pentingnya. Artinya pola yang digunakan Suharto pada esensinya kontradiktif dengan logika pers itu sendiri.¹⁹

Tidak heran jika Orde Baru sedemikian represifnya dengan pers, karena pers adalah penghalang bagi lahirnya demokrasi Pancasila yang hegemonik dan dominatif. Untuk mengoperasikan model kepemimpinannya, maka Orde Baru harus mengideologisasikan keamanan masyarakat. Artinya, Orde Baru harus mampu menciptakan kesan bahwa rasa keamanan selalu dibutuhkan. Untuk menciptakan perasaan semacam ini pada masyarakat, maka Orde Baru menggunakan logika *perpetuation of insecurity* atau mengabadikan rasa ketidakamanan. Dengan mengabadikan rasa ketidakamanan ini, Orde Baru akan lancar ketika menggunakan kepemimpinan yang militeristik. Sehingga, dengan sendirinya pengabdian rasa ketidakamanan ini menjadikan keamanan layaknya seperti agama. Keamanan yang dihubungkan dengan pers itu bukan keamanan yang sifatnya fisik, tetapi keamanan di sana sudah menjadi suatu ideologi, dan dalam prosesnya terjadi suatu ideologisasi keamanan.²⁰

Istilah pers digunakan dalam konteks historis seperti pada konteks "*press freedom or law*" dan "*power of the press*". Sehingga dalam fungsi dan kedudukannya seperti itu, tampaknya, pers dipandang sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi masyarakat secara massal sebagaimana diungkapkan John C. Merrill. Seharusnya pers selain mempengaruhi masyarakat, pers juga bisa mempengaruhi pemerintah. Karena pengertian secara massal itu adalah seluruh lapisan masyarakat baik itu pemerintah maupun masyarakat. Namun . di Era Orde Baru, dewan pers memang gagal meningkatkan kehidupan pers

¹⁹ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 25

²⁰ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010). Hlm 25

nasional, sehingga dunia pers hanya terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru tanpa bisa memperjuangkan hak-haknya.²¹

Pilihan untuk melawan akan menjadi resiko besar dengan menghadapi pembredelan. Sedangkan media-media yang mampu bertahan di masa ini hanya menjadi pelengkap tanpa bisa memberikan kontrol terhadap proses perjalanan pemerintahan. Memang ada semacam kelumrahan yang dimaklumi masyarakat bahwa pers memang hanya bisa berbuat demikian karena kuatnya intervensi. Sehingga buku yang mengupas soal peran media di era Suharto, yakni membela pemerintah. Hal tersebut bisa dilihat dari produk-produk pemberitaan khususnya di bagian tajuk rencana alias politik keredaksian dari media bersangkutan.²²

Pembredelan tahun 1994 pada Pers Tempo DeTik, Editor membuat dunia Pers Indonesia tercengang. Tindakan represif ini memicu reaksi solidaritas dan perlawanan dari berbagai lapisan masyarakat dan juga wartawan di berbagai kota. Gerakan perlawanan ini terus berkembang, dan pada tanggal 7 Agustus 1994, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan penulis kolom berkumpul di Sirnagalih, Bogor. Di hari tersebut, mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih, gerakan ini menuntut hak publik atas informasi, menentang pembungkaman pers, menolak kendali tunggal atas jurnalis, dan mengumumkan pembentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).²³

Dalam program nya AJI menjadikan majalah sebagai media nya yang bernama majalah Suara Independen. Majalah ini awalnya berbentuk buletin yang hanya di edarkan di kalangan rekan wartawan-wartawan dan mahasiswa, lalu berkembang menjadi sebuah majalah.²⁴

²¹ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010).hlm 27

²² Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010).hlm28

²³ aji.or.id, 'Sejarah Aliansi Jurnalis Independen', <https://Aji.or.Id/Read/Sejarah.Html>
<<https://aji.or.id/read/sejarah.html>> [diakses 22 September 2023 pukul 23.00].

²⁴ Aliansi Jurnalis Independen, *Semangat Sirnagalih*. Hlm 133

Di karenakan majalah ini beredar secara bawah tanah (klandestin), oleh karena itu isi dan beritanya sangat memuat informasi yang informatif. dari tragedi pemberdelan tahun 1994 hingga peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa 27 Juli 1996 di muat baik dalam 3 edisi.

Dari uraian di atas tergambarkan mengenai kondisi pers pada masa Orde Baru, yang berpengaruh bagi pembentukan citra terhadap pembacanya, terutama dalam pemuatan berita politis, maka penulis merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi tentang pemberitaan peristiwa 27 Juli 1996 dengan Judul **Majalah Suara Independen (Peristiwa 27 Juli 1996 masalah internal PDI).**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang penulis ingin menuliskan Rumusan masalah sebagai Berikut:

1. Bagaimana kondisi pers masa Orde Baru ?
2. Bagaimana peristiwa 27 Juli 1996 dalam majalah suara independen ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Tujuan Penelitian sendiri penulis ingin menyampaikan tujuan rumusan masalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kondisi pers masa Orde Baru
2. Untuk mengetahui peristiwa 27 Juli 1996 dalam majalah suara independen

D. Kajian Pustaka

Untuk kajian pustaka, sangat penting untuk penyusunan dalam melengkapi sumber sumber yang akan disusun untuk penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari sumber informasi, diantaranya berupa buku, majalah, artikel, surat kabar, karya ilmiah, internet, dan bentuk lain yang berhubungan dengan topik kajian.

Setelah melakukan penelusuran sumber, hingga saat ini setidaknya penulis telah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan topik yang akan di bahas. Penelusuran penulis ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang kurang etis dalam ruang lingkup akademik. Rencana penelitian ini dibuat berdasarkan pada karya-karya sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam menyusun rencana penelitian ini, diantaranya:

Skripsi :

1. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Abdul Rohman (2019).
Peristiwa 27 Juli 1996 dalam pemberitaan media cetak (Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republika)
Dalam skripsi yang di tulis oleh Muhammad Abdul Rohman ini menjelaskan peristiwa 27 Juli 1996 dalam pemberitaan surat kabar Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republika. Menerangkan bagaimana analisis pemberitaan dan isi pemberitaan.
2. Skripsi yang di tulis oleh Aam Amaliah Rahmat (2013)
PERISTIWA 27 JULI 1996 :Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi
Dalam skripsi ini menjelaskan peristiwa kudeta 27 Juli 1996, dalam skripsi ini di jelaskan bagaimana latar belakang dari terjadi nya peristiwa ini dimana dalam peristiwa ini menjelaskan bagaimana kubu soerjadi merebut paksa markas PDD PDI dari kubu megawati.

Jurnal :

Eko Nurul Akbar. (2015) PEMBERITAAN KORAN TENTANG PERISTIWA 27 JULI 1996 (KOMPAS DAN SUARA KARYA)

Dalam jurnal ini menjelaskan peristiwa 27 Juli 1996 dalam perspektif surat kabar Kompas dan Suara Karya. Dalam isinya mejelaskan tentang peristiwa 27 Juli 1996. Dalam isinya ada perbedaan dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 antara

Kompas dan Suara Karya, perbedaannya terletak pada pemberitaan Kongres Medan, mimbar bebas, pelaku peristiwa 27 Juli 1996, dan hukuman terhadap pelaku peristiwa 27 Juli 1996. Dan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 yakni pemilik media pers, independensi serta kepentingan Kompas dan Suara Karya yang saling bertentangan.

Perbedaan dari skripsi dan jurnal yang terdahulu adalah terdapat dari segi pembahasan dan juga dari segi media penelitian. Adapun yang penulis teliti merupakan Media Cetak berbentuk Majalah.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah prosedur, langkah-langkah, atau cara yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah melalui empat tahapan, yaitu tahapan heuristik atau pengumpulan sumber/data sejarah, lalu tahapan kritik atau verifikasi, yaitu tahapan menyeleksi sumber yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik, selanjutnya tahapan interpretasi, yaitu tahap menafsirkan dan merangkai fakta sejarah, terakhir tahapan historiografi atau penulisan sejarah, tahap ini adalah tahap paling akhir dalam metode penelitian sejarah.

Tahapan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri sebagai berikut :

1. Heuristik

Tahap awal yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu tahapan heuristik. Langkah ini adalah cara kerja penulis dalam memperoleh, menemukan, dan mengumpulkan sumber berikut dengan memberikan klasifikasi terhadap sumber yang telah penulis dapatkan di lapangan.²⁵ Sumber-sumber yang penulis dapatkan merupakan informasi yang berkaitan dengan masalah

²⁵ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak 2007), hlm. 96.

yang penulis kaji, yang pada tahapan selanjutnya akan diolah dan dikonversi menjadi fakta sejarah yang akan direkonstruksi.

Tahapan heuristik terdiri dari dua macam berdasarkan klasifikasinya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pada tahap heuristik kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan.²⁶

Tahap heuristik ini merupakan sebuah tahapan pertama yang harus dilakukan sejarawan atau peneliti sejarah, pada tahapan ini penulis mencoba untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan judul kajian dari penelitian ini.

Proses pengumpulan sumber ini peneliti melakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, dan dengan berkunjung atau observasi ke perpustakaan terdekat. Diantara sumber – sumber tersebut ialah :

a. Sumber Primer

Informasi sumber primer biasa dikenal dengan pengetahuan tentang peristiwa dari tangan pertama atau langsung dibuat (waktunya sama) dengan ketika peristiwa itu terjadi.²⁷

1) Sumber Tertulis

- a) Majalah Suara Independen edisi no 1/II/juni 1996
- b) Majalah Suara Independen edisi no12/II/Juli 1996
- c) Majalah Suara Independen edisi no1/III/Agustus 1996

2) Sumber Visual

Liputan berita dari Liputan 6 petang tanggal 27 Juli 1996

b. Sumber Sekunder

²⁶ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustakan Setia 2014), hlm 93-125.

²⁷ Heryati, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Palembang, 2017). Hlm 73

Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, yaitu studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Sumber yang diperoleh berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1) Sumber Tertulis

- a) Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Abdul Rohman (2019). Peristiwa 27 Juli 1996 dalam pemberitaan media cetak (Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republika)
- b) Skripsi yang di tulis oleh Aam Amaliah Rahmat (2013) PERISTIWA 27 JULI 1996 :Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi
- c) Buku Militer dan Politik kekerasan Orde Baru oleh mizan hasil penelitian TIM LIPI
- d) Buku yang ditulis oleh YLBH Indonesia yang berjudul 1996: Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia.
- e) Eko Nurul Akbar. (2015) PEMBERITAAN KORAN TENTANG PERISTIWA 27 JULI 1996 (KOMPAS DAN SUARA KARYA)
- f) Buku Peristiwa 27 Juli oleh Asosiasi Jurnalis Independen
- g) Buku yang di tulis oleh Aliansi Jurnalis Independen, yang berjudul Semangat Sirnagalih.

2. Kritik

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian sejarah adalah verifikasi atau kritik. Tahapan ini berarti pengujian atau penilaian sumber-sumber yang telah dikumpulkan dalam tahap heuristik tadi dari sudut pandang nilai kenyataan (kebenarannya).²⁸ Lebih jelasnya, pada tahapan ini peneliti akan

²⁸ Endah dan Wasino Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), Hlm 12.

menyeleksi sumber yang telah didapatkan. Menurut Kuntowijoyo, dalam tahapan ini terbagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Keduanya memiliki tujuan guna mengetahui kredibilitas dan autensitas sumber.²⁹

a. Kritik Ekstern

Kritik Eksternal dilakukan dengan cara menyeleksi sumber, baik bentuk fisik dari sumber yang diperoleh. Berbagai sumber primer yang telah penulis temukan, alhamdulillah memiliki kondisi fisik yang terawat, terlihat, terbaca dan suara dari narasumber masih cukup jelas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber primer yang diperoleh tidak memiliki kecacatan dan sangat layak untuk digunakan sebagai bahan sumber dalam penyusunan topik yang dipakai.

1) Sumber Primer

Dalam bentuk fisik dari sumber-sumber yang peneliti dapat semuanya dalam keadaan baik dan masih bisa di baca. Terlebih pada sumber primer dalam kondisi yang sangat baik. Dan pada sumber sekunder yang peneliti peroleh, dapat dikatakan dalam kondisi baik.

- a) Majalah Edisi no 1/II/juni tahun 1996 sumber primer ini berbentuk majalah dan dalam keadaan baik terlebih pada bentuk fisiknya peneliti menemui dalam keadaan baik dan bisa di baca.
- b) Majalah Edisi no 12/II/Juli tahun 1996 sumber primer ini berbentuk majalah dan dalam keadaan baik terlebih pada bentuk fisiknya peneliti menemui dalam keadaan baik dan bisa di baca.
- c) Majalah Edisi no 1/III/Agustus tahun 1996 sumber primer ini berbentuk majalah dan dalam keadaan baik terlebih pada bentuk fisiknya peneliti menemui dalam keadaan baik dan bisa di baca.

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), Hlm 77.

- d) Rekaman visual dari liputan pemberitaan dari stasiun TV SCTV dengan program Liputan6 Petang yang menyiarkan secara langsung aksi penyerangan dan kerusuhan di kantor PDD PDI. Masih dalam keadaan baik dan bisa di lihat di link <https://youtu.be/WndZPvp2TKo>

2) Sumber Sekunder

Pada sumber sekunder yang di dapatkan oleh penulis ialah sumber buku-buku yang berkaitan dengan peristiwa 27 Juli 1996, selain buku ada pula surat kabar dan juga skripsi mengenai peristiwa terkait.

- a) Buku yang berjudul Militer dan Politik kekerasan Orde Baru (2001) berisi tentang sekumpulan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Kondisi sumber ini dalam keadaan baik dan dapat di baca. Dan peneliti memiliki bentuk fisik.
- b) Buku peristiwa 27 Juli (1997) yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi Aliansi Jurnalis Independen. Dalam kondisi baik dan berbentuk fisik.
- c) Buku 1996: tahun kekerasan potret pelanggaran HAM di Indonesia (1997) merupakan buku yang berisi berupa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Kondisi dari sumber dalam keadaan baik. Dan peneliti memiliki fisik sumber terkait.
- d) Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Abdul Rohman (2019). Peristiwa 27 Juli 1996 dalam pemberitaan media cetak (Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republika) yang memuat peristiwa 27 Juli dalam Media cetak Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republika. Sumber tersebut dapat di lihat di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- e) Skripsi yang di tulis oleh Aam Amaliah Rahmat (2013) PERISTIWA 27 JULI 1996 : Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi memuat tentang peristiwa 27 Juli tahun 1996. Sumber tersebut dapat di lihat dalam kondisi online dalam repositori perpustakaan UPI.

- f) Buku yang di tulis oleh Aliansi Jurnalis Independen, yang berjudul Semangat Sirnagalih yang berisi tentang Berdirinya organisasi AJI dan berbentuk PDF.

b. Kritik Intern

Kritik internal menekankan kritik pada aspek isi dari sumber yang didapat. Setelah fakta kesaksian diteliti melalui kritik eksternal, selanjutnya untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu, dan memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan atau tidak, semua itu dilakukan dalam tahapan kritik internal.

Untuk mengetahui sumber itu benar, dapat dipercaya, jujur, dan shahih, penulis melakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut: meneliti sifat dari sumber, apakah sumber itu resmi atau tidak; meneliti pengarang sumber, apakah pengarang tersebut mampu menyampaikan kebenaran dan kesaksiannya terhadap peristiwa yang berkaitan dengan penulisan tersebut benar atau tidak.

1) Sumber Primer

Majalah SUARA INDEPENDEN merupakan majalah yang memuat tentang berita pada masa Orde Baru yang mana pada salah satu edisi memuat peristiwa Kudeta 27 Juli 1996, termuat dalam tiga edisi Majalah. Edisi, Juni, Juli, dan Agustus. Selain sumber majalah peneliti mendapatkan sebuah sumber, dan selain sumber tertulis ada pula sumber visual

- a) Majalah Edisi no 1/II/juni tahun 1996 memuat tentang awal mula kerusuhan dan malapetaka bagaimana kerusuhan dalam internal partai PDI.
- b) Majalah Edisi no 12/II/Juli tahun 1996 memuat tentang hal mengenai pra peristiwa dan memuat wawancara dari tokoh-tokoh PDI dan juga simpatisan Megawati.
- c) Majalah Edisi no 1/III/Agustus 1996 berisi tentang pasca kerusuhan peristiwa 27 Juli 1996 yang mana memuat tentang peristiwa kerusuhan

pada tanggal 27 Juli yang terjadi di kantor PDD PDI yang bertempat di jalan diponegoro Jakarta pusat.

- d) Rekaman visual dari liputan pemberitaan dari stasiun TV SCTV dengan program Liputan6 Petang yang menyiarkan secara langsung aksi penyerangan dan kerusuhan di kantor PDD PDI.

2) Sumber sekunder

Pada sumber sekunder yang di dapatkan oleh penulis ialah sumber buku-buku yang berkaitan dengan peristiwa 27 Juli 1996, selain buku ada pula surat kabar dan juga skripsi mengenai peristiwa terkait.

- a) Buku yang berjudul Militer dan Politik kekerasan Orde Baru (2001) berisi tentang sekumpulan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.
- b) Buku peristiwa 27 Juli (1997) yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi Aliansi Jurnalis Independen yang mana menjelaskan tentang peristiwa 27 Juli sesuai fakta dilapangan.
- c) Buku 1996: tahun kekerasan potret pelanggaran HAM di Indonesia (1997) merupakan buku yang berisi berupa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.
- d) Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Abdul Rohman (2019). Peristiwa 27 Juli 1996 dalam pemberitaan media cetak (Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republika) yang memuat peristiwa 27Juli dalam Media cetak Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republika.
- e) Skripsi yang di tulis oleh Aam Amaliah Rahmat (2013) PERISTIWA 27 JULI 1996 :Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi memuat tentang peristiwa 27 Juli tahun 1996.
- f) Buku yang di tulis oleh Aliansi Jurnalis Independen, yang berjudul Semangat Sirmagalih yang berisi tentang Berdirinya organisasi AJI

3. Interpretasi

Setelah sumber di kritisi, selanjutnya yakni tahap interpretasi, dalam tahap ini penulis melakukan kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Dalam hal ini penulis berusaha melakukan penafsiran se-objektif mungkin dengan senantiasa mencantumkan sumber-sumber dan teori yang penulis temui dan tentunya teori dan sumber tersebut berkaitan dengan topik penelitian. Teori yang di gunakan adalah teori Jurgen Habermas - Teori Komunikasi Publik. Habermas mengusulkan bahwa komunikasi publik yang rasional dan partisipatif adalah dasar demokrasi yang sehat.³⁰ Dia menekankan pentingnya ruang publik yang terbuka untuk diskusi dan pertukaran ide yang bebas dari dominasi kepentingan ekonomi atau politik. Yang mana menurut Jurgen Pers merupakan Media yang bisa menyampaikan Informasi secara bebas dan tidak terpengaruh pada intervensi.

4. Historiografi

Terakhir tahap historiografi yakni tahap penulisan sejarah dengan cara merekonstruksi hasil fakta-fakta yang telah diuraikan, lalu disusun menjadi sebuah kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Penulis menyusun secara sistematis dalam sistematika beberapa bagian yaitu.

Bab 1 pendahuluan yang di dalamnya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Dan dalam Bab 2 penulis akan membahas tentang apa itu AJI dan juga majalah Suara Independen. Dimana penulis akan memaparkan sejarah organisasinya dan juga akan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan Majalah Suara Independen.

³⁰ Muhammad Eryad Muttaqien, "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif," *Jurnal Ilmu Komunikasi* VI, no. 1 (2023): Hlm 51.

Pada Bab 3 akan membahas tentang peristiwa 27 Juli dan pemberitaan peristiwa 27 Juli 1996 dalam majalah Suara Independen dan Dampak dari peristiwa tersebut terhadap perpolitikan Indonesia. Penulis akan menguraikan kembali tentang Permasalahan internal Partai Demokrasi Indonesia pada Majalah Suara independen edisi no 1/II/juni tahun 1996. Dan pada edisi no 12/II/Juli tahun 1996 penulis akan membahas tentang peristiwa tersebut dalam Topik Utama nya. Dan di edisi no 1/III/Agustus tahun 1996 penulis akan membahas pasca peristiwa tersebut dalam pemberitaan topik utama dari majalah tersebut. Dan membahas Dampak politik dari peristiwa tersebut dalam perpolitikan Indonesia.

Bab 4 berisi kesimpulan dan juga akan menyertakan lampiran dan daftar pustaka. Dalam Bab ini merupakan Bab penutup yaitu pada sub-bab satu kesimpulan dari pembahasan. Dan pada Sub-bab ke dua merupakan saran. Dan di akhir melampirkan daftar sumber dan lapiran-lampiran.

